KULIAH VII

KRISIS EKONOMI
DAN KEMISKINAN PEDESAAN (I)

Pada bulan Juli 1998 membuta dibuat sebuah taksiran bahwa penduduk miskin Indonesia mencapai 79 juta jiwa, atau 39% dari penduduk Total Indonesia. Yang berarti meningkat 56 juta orang (28%) dari jumlahnya pada tahun 1996.

JPS (Jaring Pengaman Sosial) adalah jaringa penyelamatan masyarakat , keluarga dan perorangan, yang sedang dalam kesusahan. Jaring ditebar melalui kerja dan upaya bersama antara instansi-instansi pemerintah, relawan dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM)

Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Ekonomi Indonesia sedang sakit keras yang membutuhkan obat mujarab dan dokter yang hebat. Penyakit Indonesia sulit diobati dan obat apapun dikhawatirkan tidak manjur. Pendapat kedua bahwa penyakit ekonomi Indonesia tidak sedang sakit parah, tetapi sedang pingsan. Hal ini terjadi karena aturan main dalam perekonomian global cenderung dikuasai oleh pihak kapitalisme. Sedangkan system ekonomi Indonesia seharusnya ikut memainkan peranan juga dalam perekonomian global.

Pada siding MPR tahun 1998, ada ketetapan penting yang berkaitan dengan mengatasi ekonomi, yaitu dengan merombak secara radikal sistemen eknonomi kapitalis diganti dengan system ekonomi yang berdasarkan Pancasila.Dan khususnya menunjuk pada sila ke 4 yaitu demokrasi ekonomi dan kerakM, di 3 desa DIY, Jateng dan Jatim. Untuk meneliti sejauh mana krisis ekonomi sudah berhasil ditanggulangi oleh penduduk miskin pedesaan. Masing-masing desa di Klaten, Sidoharjo, Sriharjo (Imogiri). Dari penelitian terungkap bahwa terapat beragam tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program JPS. Salah satu masalah adalah penetapan sasaran penduduk miskin yang dianggap berhak menerima bantuan. Selanjutnya masalah lain yang tidak kurang penting adalah sejauh mana pemerintah pusat perlu memberikan pengarahan-pengarahan dalam bentuk aturan-atuaran pengelolaan program/proyek

Bank Dunia dan kemiskinan

Bank Dunia yang dimasa lalu telah banyak memuji-muji keberhasilan pembangunan Indonesia, kemudian malah berbalik. Angka kemiskinan 40% dari BPS diperturunkan menjadi 14,4% oleh satu tim peneliti dari bank Dunia suatu penurunan yang luar biasa besar. Dengan penelitian itu dianggap bahwa penduduk miskin telah dengan baik bekerja sama menyiasati krisis ekonomi sehingga dampak negative krisis tidak terlalu parah, bahkan dapat diubah menjadi perkembangan kegiatan eknomi masyarakat. Yang menarik adalah penemuan ini berasal dari survey di wilayah jawa yang dicatat sebagai paling terkena dampak krisis ekonomi.

Strategi lain menanggulangi Krisis Ekonomi

Salah satu asumsi lain program ala JPS adalah bahwa tanpa bantuan pemerintah penduduk miskin pedesaaan tidak akan bertahan hidup, sehingga dikhawatirkan akan menderita kelaparan.

Wawancara atas 331 responden di Desa Kalitengah menyimpulkan bahwa hanya 7% warga desa yang tinggal diam atau pasrah, sedangkan 87% telah berusaha keras mengatasi dampak krisis. Dari 87% penduduk desa yang paling menonjol adalah dengan cara lebih berhemat dan lebih berhati-hati dala mengelola dana terbatas termasuk dalam mengelola dana tabunga, pembukaan usaha baru, dan menggunakan secara lebih efisien sumber-sumber ekonomi yang dikuasai keluarga. Sehingga hanya kurang dari separuh (47%) warga desa yang benar-benar merasakan adanya masalah dan hanya 32% yang benar-benar merasakan penurunan dalam kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ekonomi rakyat tahan banting

Dalam buku tulisan RH Tawney, Land and Labour in China (1932) diuraikan sebab-sebab mengapa petani Cina kelak harus berontak melawan siapapun yang selalu memerasnya. Jadi kondisi petani di pelosok-pelosok desa di Cina dianggapnya sangat tertekan, mereka hidup dalam kemiskinan luar biasa, sehingga bencana-bencana kelaparan terlalu biasa dalam kehidupan mereka.

Sedangkan Indonesia sebagai Negara dengan penduduk terbesar nomor 4, di dunia sudah mengalami banyak kemajuan dan standar hidup warganya pada umumpunya sudah bertambah baik. Namun yang menjadi masalah seperti halnya cina, Indonesia terbagi-bagi atas daerah-daerah yang amat berbeda taraf kemajuannya.

Reformasi telah membawa banyak perubahan dalam perekonomian Indonesia dan paling menonjol adalah kesadaran kembali bahwa peranana pertanian benar-benar tidak lagi dapat diabaikan dalam perekonomian nasional. Lebih-lebih dalam krisis ekonomi nilai tukar hasil pertanian pada umumnya mengalami perbaiakn yang menguntungkan petani, dan ekonomi nasional menjadi terlindungi dari kemerosotan yang lebih parah.

Dengan adanya globalisasi maka sebenearnya fenomenanya sangat membingungkan berbagai pihak dalam menyikapinya secara benar. Globalisasi bukanlah sebagai dewa penolong, atau bukan pula sebagai hantu. Tetapi globalisasi adalah sebuah proses perkembangan ekonomi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kemajuan ekonomi dan teknologi dunia. Dalam proses kemajuan ini para kapitalis memegang kartu truf yang akan memenangkan permainan, sebaliknya Negara berkembang harus membayar mahal bahkan bias hancur berantakan.

Cara terbaik menghadapi proses globalisasi yang berbahaya dan penuh resiko ini tidak banyak pilihan, tetapi harus berprinsip pada rasa percaya diri atau dengan semangat kemandirian mengandalkan kekuatan ekonomi rakyat banyak.

Kapitalisme Perkebunan dan Kemiskinan

Salah satu contoh kerumitan masalah tanah di Jawa adalah menyangkut tanah milik rakyat untuk tanaman tebu bagi industry gula. Berbagai undang-undang telah dibuat pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan produksi gula yang sekaligus juga meningkatkan pendapatan petani. Dalam prakteknya tujuan yang baik ini sulit tercapai, dan kemudian ternyata sebaliknya yang benar-benar terjadi yaitu produksi dan produktivitas gula malah menurun, dan petani makin enggan menanam tebu karena pendapatan dari usaha tani tebut terus menerus menurun.

Mengapa pemerintah memperkenalkan kebijaksanaan yang ternyata malah merugikan petani tebu, sehingga menurunkan produksi gula dan meningkatkan import gula? Sebabnya adalah

adanya sekelompok pengusaha/kapitalis yang benar-benar diuntungkan dari pemanfaatan kredit murah dari pemerintah. Sistem ini secara tidak langsung membuka system kapitalisme ke dalam dunia perkebunan tebu. Setelah berjalan system ini maka industry gula tebu di jawa benar-benar hancur.

Penutup

Bahwa para ekonom cenderung menganggap krisis ekonomi Indonesia sebagai kiamat atau kembali ke nol adalah karena naik turunnya produk domestic bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai satu-satunya indicator kemakmuran rakyat. Semua analisis ekonomi dianggap terukur ole PDB sebagai ekonomi tunai. Padalah kebanyak Negara berkembang, kegiatanna ekonominya termasuk ekonomi rakyat seringkali melibatkan uang tunai.

Dengan demikian makin besar keyakinan kita akan kekuatan keswadayaan dan kemandirian ekonomi kita. Pada dasarnya tingkat keswadayaan ekonomi Indonesia masih tinggi sehingga tidak pada tempatnya kehancuran sector industry modern dan perbankan dalam krisis ekonomi sekarang sebagai akibat langsung dari krisis ekonomi mengakibatkan bangsa Indonesia berputus asa.